

MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN *GOOD SCHOOL GOVERNANCE* (GSG) PADA SEKOLAH DASAR

Sriyono¹, Farah Maulidiah²

^{1,2}Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Bisnis Hukum Dan Ilmu Sosial, Universitas
Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

sriyono@umsida.ac.id¹, 216110100022@umsida.ac.id²

Abstract: *This study aims to determine the management of BOS funds in realizing Good School Governance at SD Muhammadiyah. The subjects of this study were school principals, BOS treasurers, teachers, parents, and the Education Office. This type of research is qualitative with data collection methods of interviews, observation and documentation. Data analysis in this study used the Nvivo 12 plus software. The results of the research show that the management of school operational assistance funds (BOS) at SD Muhammadiyah Reinforcement is still not fulfilled in terms of accountability, transparency and effectiveness & efficiency, resulting in the implementation of good school governance not being maximized and transparency, accountability, and effectiveness must always be improved. efficiency in order to increase the effectiveness of fund management. The practical implications of this research are beneficial for SD Muhammadiyah Reinforcement which needs to improve good school governance in improving performance, especially the management of BOS funds.*

Keywords: *School Operational Assistance Fund (BOS), Good School Governance.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana BOS dalam mewujudkan *Good School Governance* di SD Muhammadiyah. Subyek penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Guru, Orang Tua Siswa, dan Pihak Dinas Pendidikan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan *software Nvivo 12 plus*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Muhammadiyah masih belum terpenuhi dalam akuntabilitas,transparansi dan efektif & efisiensi, sehingga menyebabkan pelaksanaan *good school governance* belum maksimal dan harus selalu lebih ditingkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektif & efisiensi agar semakin meningkatnya efektivitas pengelolaan dana. Implikasi praktis dari penelitian ini bermanfaat bagi SD Muhammadiyah yang perlu meningkatkan *good school governance* dalam meningkatkan kinerja, khususnya pengelolaan dana BOS.

Kata Kunci: *Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Good School Governance.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan komponen penting dalam meningkatkan sumber daya manusia seutuhnya yang berkualitas. Dimana proses pendidikan dari masa ke masa terus mengalami kemajuan yang cukup pesat, dan telah menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia (Trihapsari, 2021) [1]. Namun kenyataannya, bahwa tidak semua manusia mampu menempuh pendidikan dengan layak, karena berbagai factor termasuk mahalanya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan (Prabu, 2013:128) [2].

Dalam proses untuk mencapai kualitas pendidikan yang baik, tidak bisa dipungkiri bahwa diperlukan biaya yang besar agar hal tersebut dapat tercapai. Biaya pendidikan adalah suatu komponen wajib untuk pendidikan agar segala sesuatu dapat dimudahkan dalam proses Pendidikan. Biaya untuk pendidikan adalah semua hal yang dikeluarkan guna terselenggaranya proses pendidikan (Khasanah,2018) [3]. Hal tersebut ialah salah satu unsur dasar yang paling dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Apabila tidak terdapat biaya pendidikan yang mendukung dan memadai, hal tersebut menyebabkan proses pendidikan tidak berjalan dengan baik (Susilawati et al., 2014) [4].

Masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan, jika kita diperhatikan pasti akan berujung pada satu bagian yang menjadi dasar yaitu biaya pendidikan yang umumnya diperlukan dalam jumlah yang besar untuk penyelenggaraan proses Pendidikan (Prasojo, 2012) [5]. Dalam

penyelenggaraan proses pendidikan, dibutuhkan biaya-biaya yang wajib dikeluarkan tidak hanya biaya langsung tetapi juga terdapat yang bersifat tidak langsung.

Maka dari itu masalah biaya masih menjadi pertimbangan bagi seseorang untuk menempuh pendidikan khususnya bagi masyarakat yang berlatar belakang ekonomi kurang mampu. Masalah tersebut juga dijelaskan bahwa biaya pendidikan di Indonesia masih mahal dan masih menjadi masalah untuk masyarakat menengah ke bawah (Idris, 2010) [6]. Sumber dana yang masih tersendat merupakan salah satu masalah dalam dunia pendidikan (Azhari & Kurniady, 2016) [7], masalah tersebut tentunya memerlukan bantuan dari pihak pemerintah. Peran pemerintah telah terlihat sejak tahun 2005 dengan mengucurkan bantuan dana pendidikan lewat Progam Bantuan Operasional Sekolah atau yang kita kenal Dana BOS. Bantuan ini dikeluarkan dengan tujuan memberi kebebasan untuk biaya pendidikan bagi siswa yang dirasa tidak mampu, dan memberikan keringanan biaya untuk siswa lainnya [8].

Program ini diharapkan berperan dalam pencapaian penuntasan wajib belajar dua belas tahun. Dana BOS hanya cukup digunakan untuk membiayai operasional pendidikan, dana tersebut tidak mampu mengganti semua biaya pribadi yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak di sekolah. Pemerintah tidak lepas tangan dalam membiayai pendidikan lewat bantuan dana BOS, namun bantuan tersebut sifatnya masih terbatas (Fironika K.,2005) [9], pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah, namun masih ada sekolah yang menggunakan

dana BOS tidak sesuai dengan rencana penggunaan dana BOS.

Bahkan ketika diaudit oleh Dinas Pendidikan menemukan bahwa banyak sekolah-sekolah masih dalam pengawasan pemerintah karena diduga masih banyak yang tidak melakukan pelaporan dana BOS secara akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban belum diterapkan secara maksimal di sekolah baik kepada masyarakat dan Dinas Pendidikan. Seperti objek penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu SD Muhammadiyah dalam pengelolaan dana BOS yang sering terjadi yaitu kekurangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diterima, kurangnya kemampuan tim manajemen BOS dalam mengelolan dana BOS dan kurang tepat waktu dalam memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, sehingga perlu adanya evaluasi perbaikan atas pengelolaan dana BOS sehingga para orang tua sebagai *stakeholder* mendapatkan pengetahuan terkait jumlah besaran dana per siswa yang didapat dari subsidi pemerintah agar tidak terjadi penyelewengan dana BOS tersebut. Sementara itu pihak Dinas Pendidikan terus melakukan pengawasan terkait perencanaan anggaran maupun laporan pengeluaran dengan jumlah besar dan tidak realistis.

Dari masalah di atas, dapat kita lihat bahwa masih kurangnya pelaporan secara akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan dana BOS. Masalah yang terjadi dalam pengelolaan dana BOS diantaranya adalah pihak SD Muhammadiyah harus didukung dengan prinsip *Good School Governance* yang baik dalam pengelolaan dana Bos untuk mengurangi kecurangan dan aktivitas

menyimpang lainnya [10]. *Good School Governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka Panjang sekaligus memenangkan persaingan bisnis global (Bayu, 2014) [11]. Melalui hasil evaluasi Dinas Pendidikan pengelolaan dana BOS masih kurang terutama mengenai akuntabilitas dan transparansi dari dana BOS itu sendiri, dengan adanya evaluasi lanjutan diharapkan SD Muhammadiyah akan lebih profesional dalam mengelola dana BOS dengan menggunakan prinsip *Good School Governance*, diharapkan akan dapat meningkatkan tingkat partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi sebuah sekolah sehingga tingkat efektivitas terhadap pengelolaan keuangan sekolah juga mengalami peningkatan.

Penelitian tentang *Good School Governance* (GSG) masih belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dan hanya sedikit yang memfokuskan pada pengelolaan dana Bos antara lain (Fauzan, 2014) [12] mengatakan pelaksanaan masih mengalami berbagai hambatan baik yang terkait pada aspek kelembagaan maupun pada teknis operasionalnya, sehingga mengindikasikan bahwa pengelolaan dana Bos masih belum maksimal dan tidak efektif disebabkan oleh ketidaksesuaian antara perencanaan dan kebutuhan sekolah yang berujung pada akuntabilitas pengelolaanya juga belum optimal sedangkan transparansi dan partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana Bos. Sedangkan menurut (Masyitah, 2019) [13] pihak sekolah kurang tepat waktu dalam memberikan laporan penggunaan dana BOS serta masih banyak sekolah yang tidak ingin

laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi pemahaman yang komprehensif tentang Pengelolaan dana BOS dari perspektif sekolah, dinas Pendidikan dan membantu Manajemen Sekolah untuk menentukan kebijakan terkait *Good School Governance* (GSG) .

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana pengelolaan (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Muhammadiyah?
- 2) Bagaimana penerapan sistematika pelaporan pada pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Muhammadiyah?
- 3) Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good School Governance* (GSG) di lingkungan SD Muhammadiyah?

Terkait dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mengetahui pengelolaan (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Muhammadiyah.
- 2) Mengetahui penerapan sistematika pelaporan pada pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Muhammadiyah.
- 3) Mengetahui penerapan prinsip-prinsip *Good School Governance* (GSG) di lingkungan SD Muhammadiyah.

TINJAUAN PUSTAKA

• Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan salah satu instrument kunci dan penentu keberhasilan substansi manajemen sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah. Kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengendalian. Manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan, manajemen keuangan yang berkaitan dengan manajemen sumber dana, manajemen menggunakan dan pengawasan penggunaan dana (Alam, (2001:324)).

Manajemen keuangan pendidikan merupakan upaya untuk mewujudkan keuangan yang baik, mesti ditransformasikan ke pelaku, pengelola keuangan pendidikan guna memahami dan menghayati prinsip dan nilai-nilai *good governance* dan *clean governance* (Setiawan,T.(2011)).

• Dana BOS

Berdasarkan depdiknas (2010; 9) menyatakan bahwa BOS adalah program yang dibuat oleh pemerintah untuk tujuan kelancaran dalam yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan dana operasional sekolah selama wajib belajar berlangsung. Menurut peraturan menteri pendidikan nasional nomor 1 tahun 2018, standart biaya operasi nonpersonalia adalah standart biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama satu tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar

satuan pendidikan dapat melakukan satuan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP) bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Tujuan (BOS) bantuan operasional sekolah secara umum program Bos bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 tahun yang bermutu.

- Good School Governance

Good School Governance (GSG) adalah istilah lain dari Good Corporate Governance (GCG) yang digunakan untuk lembaga pendidikan khususnya sekolah. Good School Governance (GSG) merupakan sarana pendukung untuk membentuk sekolah dengan tata kelola yang baik. Di dalam Good School Governance (GSG), pengelolaan keuangan menjadi salah satu pokok mendasar. Pengelolaan keuangan sekolah akhir-akhir ini menjadi isu yang diramalkan oleh berbagai kalangan, termasuk di dalamnya para orang tua murid. Keterbukaan dan pertanggungjawaban mengelola keuangan menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk berani diungkapkan oleh pihak Manajemen Sekolah.

Harsowasono (2010) bahwa Good governance dan otonomi daerah merupakan dua hal simetris, artinya keduanya merupakan variabel yang saling mempengaruhi di samping keduanya juga merupakan salah satu upaya menuju perwujudan demokratisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada interaksi dan proses dari fenomena objek yang

diteliti, kedalaman dan keautentikannya adalah alat kunci utama, tidak bisa bebas dinilai dan peneliti terlibat dengan subjek dan objek dalam penelitian (Sugiyono, 2016) [14]. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti persepsi, perilaku, tindakan, dan motivasi. Penelitian kualitatif dipilih dikarenakan memiliki keunggulan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini (Moleong, 2012:6) [15].

Metode pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi dan dokumentasi. Wawancara dapat menghasilkan kutipan langsung dari para responden tentang pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuan mereka (Patton, 2005) [16]. *In-depth interviews* sebagai teknik *qualitative research technique* dapat mencakup wawancara perorangan dengan sejumlah kecil responden untuk mengeksplorasi perspektif tentang ide khusus, program atau situasi (Boyce & Neale, 2006) [17]. Wawancara ini ditujukan kepada pihak-pihak SD Muhammadiyah dan Dinas Pendidikan yang bersangkutan dengan pengelolaan dana BOS. Lokasi Penelitian dilaksanakan di SD Muhammadiyah, yang merupakan salah satu sekolah islam yang terletak di Tulangan pada tanggal 10 sampai 17 Mei 2023. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa laporan BOS K-1 Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Laporan BOS K-2 Rincian Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran, Laporan BOS K-3 Buku Kas Umum, Laporan BOS K-4 Buku Pembantu Kas Tunai, Laporan BOS K-5 Buku Pembantu Bank, dan laporan BOS K-6 Buku Pembantu Pajak.

Kombinasi pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan *document analysis* dapat mencapai *triangulation* karena peneliti dapat mengkonfirmasi *findings* dari sekumpulan data untuk mengurangi potensial bias, sehingga kedua metode pengumpulan data ini dapat mengurangi kualitas analisa data (Bowen, 2009) [18]. Dalam metode *triangulation* peneliti menggunakan tiga data *triangulation* yaitu Pertama triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan melakukan pengumpulan data terhadap sumber (informan) terkait pengelolaan dana BOS dan penerapan prinsip *Good School Governance* yang ada di SD Muhammadiyah, maka triangulasi bisa dilakukan dengan cara mewawancarai dari pihak SD Muhammadiyah (Kepala Sekolah, Tim Manajemen BOS, Guru dan Wali Murid SD Muhammadiyah) melalui triangulasi sumber, peneliti berusaha untuk membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dari setiap sumber informan. Kedua triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas yang diperoleh dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda-beda, peneliti menggunakan triangulasi teknik dari hasil observasi partisipatif, kemudian dicek dengan wawancara mendalam. Ketiga triangulasi waktu, bahwa seringkali waktu turut mempengaruhi kredibilitas data, peneliti dalam melakukan pengujian dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi pada waktu pagi dan siang hari yang berbeda untuk menghasilkan data yang kredibel.

Tabel 2.1 Kriteria Kepercayaan Peneliti

Jenis	Sumber
Credibility	Data Triangulasi • Pihak SD Muhammadiyah • Pihak Dinas pendidikan • Kredibilitas Penilitian (dikura dengan menggunakan Nvivo 12 Plus)
Transferability	Deskripsi • Informasi demografi sampel • Deskripsi sekali-hari di SD Muhammadiyah • Deskripsi sekali-hari di SD Muhammadiyah
Dependability	Metode • Wawancara, Observasi dan Dokumentasi • Transkrip Wawancara • Ringkasan analisis tematik
Confirmability	Triangulasi pemak • Peneliti dan Pendamping

Alat analisis yang digunakan adalah dioleh menggunakan software “Nvivo 12 plus, yang mana dalam penyajiannya dapat di tampilkan berupa diagram, gambar dan tabel hasil *coding* wawancara tersebut. Analisis data yang digunakan dengan model analisis interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau *verifikasi* (Miles dan Huberman dalam Sugiyono) [19].



Gambar 2.2 (Diagram Alur Penelitian)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengolahan Data dengan Nvivo 12 Plus

Peneliti melakukan pengolahan data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dengan menggunakan *software* Nvivo 12 Plus. Pengolahan data hasil wawancara dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, yaitu mengubah file rekaman suara (*audio*) yang berada di handphone menjadi teks. Tahap ini paling penting dan utama karena merupakan langkah utama karena Langkah awal yang menentukan pengolahan data selanjutnya.

Transkrip hasil wawancara membutuhkan waktu yang cukup lama karena peneliti harus mencermati, memahami terhadap apa yang dimaksud oleh informan pada saat wawancara.

Kemudian melalui tahap memasukkan (input data) transkrip hasil wawancara kedalam *software* Nvivo 12 Plus, dilanjutkan dengan membuat (*mind map*) berdasarkan permasalahan penelitian yaitu pertanyaan penelitian dan pertanyaan wawancara, melakukan modifikasi sesuai pertanyaan penelitian dan pertanyaan wawancara, dan membuat model yang memetakan hubungan keterkaitan antara informan dengan permasalahan dalam penelitian.

Hasil pengolahan data ditampilkan dengan menggunakan model bagan hasil penelitian yang tersedia pada *software* Nvivo 12 Plus. Salah satu model visualisasi bagan hasil koding masing-masing permasalahan dalam penelitian dan dilanjutkan dengan visualisasi bagan triangulasi hasil penelitian. Dalam hasil analisis data dengan menggunakan diagram perbandingan terdapat beberapa simbol untuk dapat dimengerti yang akan dijelaskan pada gambar di bawah ini:

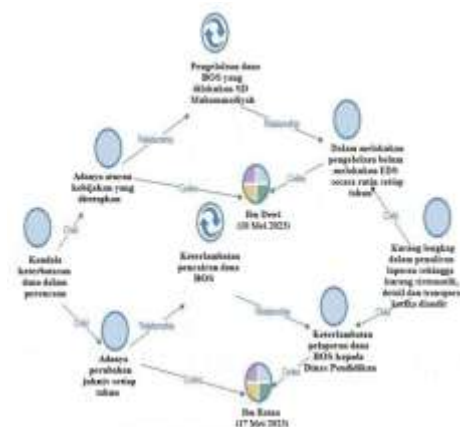


Gambar 3.1 Simbol Gambar Hasil Analisis Nvivo

Peneliti membuat model bagan atau *project map* hasil koding terhadap beberapa permasalahan penelitian yang disampaikan dalam penelitian ini yaitu:

- Visualisasi bagan pertama dalam penelitian adalah tentang pengelolaan Dana BOS (perencanaan, persiapan,

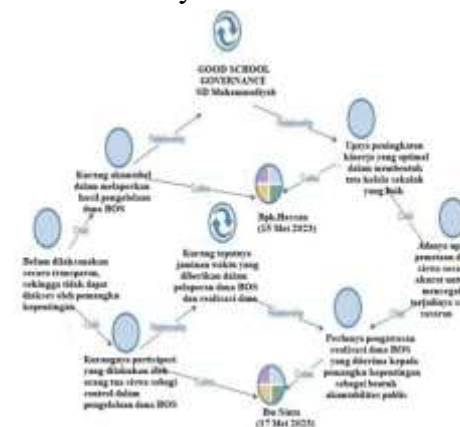
pelaksanaan dan evaluasi) di SD Muhammadiyah.



Gambar 3.2 Peta Analisis Akhir Pengelolaan Dana BOS di SD Muhammadiyah

Sumber : Data Diolah dengan NVivo, 2023

- Visualisasi bagan kedua dalam penelitian adalah tentang penerapan prinsip *Good School Governance* (GSG) di SD Muhammadiyah.



Penerapan Prinsip GSG di SD Muhammadiyah

Sumber : Data Diolah dengan NVivo, 2023

Di dalam *software* Nvivo 12 Plus, terdapat alat analisis data yang dinamakan *query*. Alat analisis ini dapat membantu peneliti dalam beberapa hal yaitu:

1. Mengeksplorasi data dan hasil koding. Pada penelitian ini semua data hasil wawancara dari beberapa informan dapat dieksplorasi menggunakan *features* yang tersedia dalam *software*, misalnya menampilkan bagan, grafik atau diagram, melihat kata-kata tertentu yang digunakan (*text search query*), mengetahui jumlah dan frekuensi kata-kata tertentu yang digunakan (*word frequency query*). Sumber data primer yang digunakan adalah transkrip hasil wawancara dengan informan.
2. Membandingkan tema-tema dan kategori-kategori yang muncul selama proses koding. Salah satu contoh yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan pencarian atau *text search query* terhadap kata “dana.” dan kata-kata lain yang bersinonim dengan kata tersebut di semua transkrip hasil wawancara dengan informan. Hasilnya ditemukan sebanyak 43 kata dengan nilai coverage sebesar 2,665.

Selain itu, untuk menampilkan beberapa output hasil *query* dapat melalui *reference* yang memunculkan kata-kata yang dicari tersebut berasal dari informan mana dan apa kalimat atau pertanyaan yang disampaikannya, dan menggunakan *word tree* untuk menampilkan kata-kata yang dicari peneliti dalam konteks kalimat yang terhubung satu sama lain. Peneliti juga melakukan analisis data menggunakan *word frequency query* dapat untuk mengetahui jumlah frekuensi terhadap kata apa yang paling banyak muncul dari semua transkrip hasil wawancara, peneliti hanya menampilkan 10

kata yang paling banyak muncul dan memiliki Panjang minimal 5 huruf atau karakter.

Tabel 3.4 Hasil Word Frequency Query

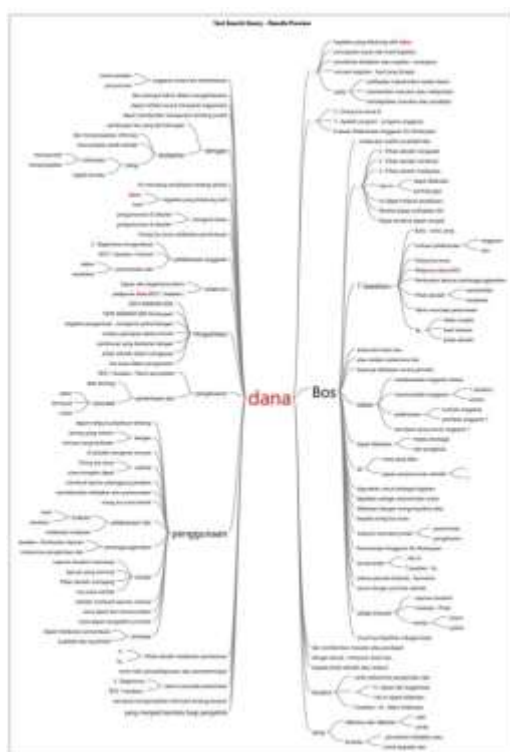
Kata	Count	Weight Percentage
Dana BOS	77	4,76%
BOS	68	4,20%
Anggaran	43	2,66%
Sekolah	41	2,57%
Penggunaan	30	1,85%

Sumber : Data Diolah dengan NVivo, 2023

Hasilnya didapatkan informasi bahwa kata “Dana BOS” merupakan kata yang paling banyak muncul yakni sebanyak 77 dengan nilai weighted percentage sebesar 4,76%. Sedangkan kata yang paling sedikit muncul berdasarkan hasil tersebut dari 10 kata yang ditampilkan adalah “Penggunaan” yakni dengan frequency sebanyak 30 dengan weighted percentage 1,85%.

Pada penelitian ini, peneliti juga ingin memahami penggunaan kata “dana” sebagai salah satu kata terdominan dan merupakan kata kunci dalam penelitian ini. Hasil pencarian selanjutnya disajikan dalam bentuk *word tree*. Melalui eksplorasi *word tree* yang dapat dilihat melalui gambar 3.1, diperoleh informasi bahwa konsep “dana” bagi seluruh *stakeholder* internal maupun eksternal sekolah, prioritas utama dalam mengalokasikan kegiatan yang selalu didukung dengan dana sehingga mendukung kegiatan atau program-program sekolah. Menurut mereka, bahwa untuk bisa mewujudkan program sekolah didukung dengan dana yang besar sehingga kegiatan operasional tetap berjalan secara optimal dari dana BOS yang telah diterima dari pemerintah. Meskipun demikian, kenyataannya mereka tetap berharap dana yang diperoleh sekolah bisa membantu dalam kesejahteraan lebih bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Meskipun,

mereka mengerti adanya keterbatasan dalam mewujudkan program sekolah karena alasan dana yang terbatas yang disebabkan karena terjadinya fluktuasi jumlah siswa setiap tahun sehingga akan mempengaruhi jumlah dana yang diterima dan keterlambatan pencairan dana yang diterima oleh sekolah.



Gambar 3.4 word tree dari penggunaan kata “dana”

Sumber: data diolah dengan Nvivo, 2023

Pembahasan

Dana BOS merupakan salah satu tumpuan pendaanaan bagi SD Muhammadiyah dalam memenuhi kebutuhan operasional. Dana BOS memang belum dapat menutup pengeluaran di sekolah secara signifikan karena hanya menutup sekitar 25% dari total pengeluaran yang ada, namun dana BOS tetap memiliki peran penting dalam kegiatan

Pendidikan di SD Muhammadiyah karena dengan adanya dana BOS maka terdapat jaminan kepada siswa yang kurang mampu di sektor dana tetap dapat melanjutkan kegiatan belajar di SD Muhammadiyah dengan baik.

SD Muhammadiyah dalam pengelolaan dana BOS ada di bawah koordinasi dari Dinas Pendidikan .Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah memberikan sosialisasi mengenai bantuan dana BOS yang diberikan kepada sekolah, kemudian menjelaskan mengenai apa itu BOS serta tujuan dan prosedur yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah dengan bantuan tersebut. Adapun perbedaan kondisi nyata dan kondisi yang diharapkan saat ini di SD Muhammadiyah dalam pengelolaan dana BOS yaitu:

Tabel 3.1 Perbandingan Kondisi Pengelolaan Dana BOS

Kondisi Saat ini atas Pengelolaan Dana Bos (SD Muhammadiyah)	Kondisi Yang diharapkan Pengelolaan Dana Bos
Perencanaan Anggaran Keterbatasan dana dan adanya perubahan aturan kebijakan	Perencanaan Anggaran Menetapkan Analisa cost effectiveness
Pelaksanaan Anggaran Adanya keterlambatan pencairan dana dan perubahan rencana	Pelaksanaan Anggaran Pencairan Bos tepat waktu sehingga kegiatan operasional tetap berjalan
Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran kurang sistematis, detail dan terbuka secara detail ketika di audit	Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran Dikomunikasikan setiap kebijakan anggaran dan dipublikasikan setiap hasil laporan anggaran yang telah di audit secara aktual
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Dalam pengelolaan Dana BOS masih belum melibatkan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) secara rutin	Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Dalam pengelolaan Dana BOS perlu melakukan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) internal secara periodik setiap tahun

Perencanaan Anggaran

Hasil pengamatan penelitian *cases* pertama secara langsung bahwa perencanaan anggaran yang dilakukan oleh SD Muhamamdiyah sudah cukup berjalan dengan baik pengelolaan dana bos menyatakan bahwa dalam proses perencanaan pengelolaan dana BOS melibatkan prinsip partisipasif Tim Manajemen BOS yang terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan Guru SD Muhammadiyah, dalam proses perencanaan

anggaran diawali dengan menyusun RKAS sebagai hasil perencanaan pengelolaan dana BOS yang tentu saja sudah sesuai standar dan nilai yang berlaku meskipun ada berbagai kendala dengan besarnya dana BOS kurang mencukupi kebutuhan sekolah dan adanya perubahan kebijakan aturan pengelolaan dana BOS yang menyebabkan program yang tidak bisa dianggarkan dari dana BOS sehingga sekolah harus menyesuaikan kembali program-program yang sudah direncanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun skala prioritas pengelolaan dana BOS sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun Dalam perencanaan anggaran, pengelola dana BOS harus tetap menerapkan analisis *cost effectiveness* untuk mencapai tujuan yang dijabarkan dalam bentuk operasional yang dapat diukur.

Pelaksanaan Anggaran

Hasil *cases* kedua yaitu pelaksanaan anggaran pengelolaan dana BOS SD Muhammadiyah adanya kendala perubahan peraturan petunjuk teknis (Juknis) dalam pengelolaan dana BOS dan keterlambatan waktu pencairan dana, dengan adanya proses keterlambatan pencairan dana sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan operasional, karna pasalnya dana BOS menjadi tumpuan sumber pendanaan bagi sekolah , sehingga bila sekolah tidak menerima dana BPOS tepat waktu dapat menyebabkan sekolah kebingungan untuk mendanai kebutuhan operasionalnya. Hal ini juga berdampak pada pelaporan dana BOS kepada Dinas Pendidikan . Penyelesaian kendala dalam pencairan dana

dengan melakukan bon terhadap rekanan yang sudah bekerjasama dengan sekolah dan penyelesaian perubahan aturan juknis setiap tahun dengan melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) ulang sesuai dengan Juknis baru yang kemudian disetor kembali ke Dinas Pendidikan.

Sesuai dengan pernyataan tersebut bahwa berjalanya operasional sekolah tentunya berkaitan dengan ketepatan pencairan dana BOS oleh pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan penelitian bahwa terdapat hambatan pada pengelolaan dana BOS yaitu pencairan dana yang sering mengalami keterlambatan sehingga menyebabkan terdapatnya hambatan dalam kegiatan operasional dana BOS (Hidayat, 2019) [20]. Operasional sekolah menjadi salah satu hal yang harus dilaksanakan pihak sekolah agar tercapainya proses belajar mengajar yang baik serta dapat terwujudnya system Pendidikan yang baik sesuai dengan tujuan dari SMA Negeri 4 Singaraja.

Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran

Hasil *cases* ketiga yaitu pelaksanaan anggaran menyatakan pengelola dana BOS juga menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS secara periodik dan tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam pelaporannya SD Muhammadiyah belum menyusun sebuah laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas yang mempresentasikan seluruh kondisi keuangan dari SD Muhammadiyah. Dalam proses pelaporan yang dilakukan oleh SD Muhammadiyah menggunakan metode *single entry* yang sistem pencatatannya amsih

sangat sederhana dan menyebabkan laporan keuangan yang disusun sekolah masih terpisah dan belum menyajikan seluruh informasi secara transparan. Dalam pencatatan dan pembukuan laporan dana BOS kurang sistematis sehingga berdampak pada tidak terbuka secara detail informasi laporan keuangan yang akan diaudit. Laporan keuangan yang ada di SD Muhammadiyah hanya berupa laporan pertanggungjawaban atas realisasi anggaran yang tersusun secara parsial dan terpisah-pisah antara laporan yang satu dengan yang lain karena sumber dana yang tersedia berbeda. Pelaporan anggaran dana BOS dilakukan dengan membuat laporan ringkas setiap catur wulan kepada Dinas dengan menyerahkan SPJ BOS yang berisi buku kas umum, buku kas pembantu kas tunai, buku pembantu pajak dan bukti pengeluaran.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Hasil *cases* keenam yaitu evaluasi pelaksanaan anggaran masih terdapat kurangnya data informasi yang akurat dan lengkap serta rendahnya kompleksitas proses pelaksanaan evaluasi pengelolaan dana BOS, hingga saat ini SD Muhammadiyah belum melaksanakan kegiatan evaluasi diri secara rutin, sehingga sekolah harus melaksanakan kegiatan evaluasi diri sekolah (EDS) secara periodik setiap tahunnya, sehingga fluktuasi, situasi dan kondisi lingkungan sekolah yang senantiasa berubah dapat ditanggapi oleh pihak sekolah secara tepat.

Pelaksanaan dan pelaporan harus dilakukan secara akuntabel yang merupakan tanggung jawab pihak sekolah atas pengelolaan dana BOS, sehingga bukan hanya

pemerintah saja yang mengetahui namun juga komite sekolah mengerti bahwa anggaran dana memiliki skala prioritas dan tujuan dimana 50% digunakan untuk operasional sekolah yang meliputi kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, konsultasi peningkatan mutu pendidikan (konsultasi dan psikologi), pengembangan perpustakaan dan pelaksanaan kegiatan *assessment* dan evaluasi pembelajaran dan 50% digunakan untuk kesejahteraan guru dan karyawan (pembayaran honor guru dan tunjangan tambahan), sehingga hasilnya efektif untuk kegiatan pengelolaan sekolah dan system belajar siswa. Tuntutan akuntabilitas sekolah sebagai salah satu sector public untuk lebih menekankan pada pertanggung jawaban horizontal (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*). Hal ini beriringan berdasarkan penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Mimi, 2023) [21]. Artinya, semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang diterapkan dalam pengelolaan dana operasional sekolah, semakin efektif penggunaan dana tersebut. Transparansi juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan dalam pengelolaan dana operasional sekolah, semakin efektif penggunaan dana tersebut.

Pengelolaan dana BOS di SD Muhammadiyah masih belum sepenuhnya memenuhi akuntabilitas, sehingga perlu ditingkatkan lebih terhadap transparansi dan

akuntabilitas. Pengelolaan dana BOS di SD Muhammadiyah telah mampu memenuhi tujuan untuk memenuhi tujuan program BOS dalam meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan dan telah disalurkan secara tepat kepada seluruh siswa di SD Muhammadiyah, dan mampu mencegah terjadinya siswa yang putus sekolah akibat keterbatasan dalam membayar biaya pendidikan. Namun Pengelolaan dana BOS di SD Muhammadiyah masih belum mampu memenuhi tujuan program BOS untuk memberikan kebebasan biaya bagi siswa tidak mampu dari beban biaya operasional sekolah dan belum mampu menutup seluruh biaya operasional sekolah, hal ini karena masih adanya biaya operasional yang lainnya yang belum dapat terpenuhi sehingga tetap membutuhkan biaya tambahan atau sumbangan dari orang tua siswa. Sedangkan dari aspek akurasi dan kelengkapan informasi pengelolaan dana BOS belum tercapai sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu perlu penambahan informasi secara akurat dalam menunjang pengelolaan dana BOS yang berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan adanya kejelasan sasaran yang selalu dikomunikasikan dengan baik kepada semua pihak dalam pengelolaan dana BOS termasuk komite sekolah yang menjadi sasaran program tersebut.

Penerapan Prinsip *Good School Governance* Di Sd Muhammadiyah

Penyelenggaraan di Lembaga Pendidikan (sekolah) yang baik merupakan kondisi yang dipengaruhi bagaimana perilaku manusia, yang memungkinkan munculnya perilaku produktif atau kontra-produktif dalam

upaya untuk mencapai tujuan sekolah dan pemenuhan terhadap tuntutan dan kepuasan *stakeholder* serta efektivitas dan efisiensi penggunaan. Sehingga penyelenggara sekolah harus mampu mempertanggungjawabkan di hadapan *stakeholder* (peserta didik, orang tua dan pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat memunculkan partisipasi dari masyarakat terhadap SD Muhammadiyah. Dengan adanya keterlibatan *stakeholder* dalam membina dan membantu menyelenggarakan sekolah merupakan bagian dalam mewujudkan sebuah organisasi yang baik *Good School Governance (GSG)* pada sekolah. Adapun Penerapan prinsip *Good School Governance* di SD Muhammadiyah dalam suatu aktivitas sekolah yang mempunyai pengaruh yang besar yaitu:

1. Adanya sebuah Akuntabilitas keuangan

Berdasarkan pengujian indikator bahwa penerapan akuntabilitas di SD Muhammadiyah memang sudah dilakukan, namun perlu dilakukan dengan baik akuntabilitas secara vertikal maupun horizontal oleh sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menciptakan *Good School Governance* dalam pendidikan. Implikasi bahwa SD Muhammadiyah kurang akuntabel dalam melaporkan hasil pengelolaan dana BOS, dengan adanya prinsip akuntabilitas bahwa adanya proses keterbukaan informasi SD Muhammadiyah dapat memperjelas adanya pertanggungjawaban yang dilakukan melalui sosialisasi kepada orang tua siswa selaku komite sehingga menjadi keharusan untuk mendapatkan informasi yang sangat layak dan akurat bagi penerapan pengembangan dana BOS itu sendiri. Akan tetapi, jika tingkat akuntabilitas berkurang atau terjadi penurunan,

maka akan membuat rasa percaya wali murid ikut berkurang dan tingkat transparan di SD Muhammadiyah sangat rendah dan akan berdampak pada rendahnya partisipasi wali murid dalam meyangga biaya penyelenggaraan pendidikan hal ini memiliki keterkaitan atau *relationship* pada pengelolaan dana BOS.

Hal ini sejalan dengan penelitian bahwa sikap akuntabel dan transparan satuan Pendidikan dalam pengelolaan APBS jika dilakukan dengan baik secara simultan maupun parsial berpengaruh dan signifikan terhadap partisipasi orang tua siswa dan semakin akurat dan tepat waktu pelaporan penggunaan dana yang dikumpulkan dari orang tua siswa, maka akan semakin tinggi partisipasi orang tua siswa dalam pembiayaan Pendidikan (Boy dan Siringoringo, 2009) [22].

2. Adanya sebuah Transparansi dalam akuntabilitas keuangan

Penerapan prinsip Transparansi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menjamin akses keterbukaan semua aspek kegiatan yang melibatkan penggunaan dana BOS dan evaluasi kepada orang tua siswa (*stakeholder*). Prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat diukur dari sejauh mana pihak sekolah melakukan *publikasi* atau pemberitahuan mengenai informasi laporan pengelolaan dana BOS kepada wali murid terkait besaran jumlah dana yang diterima per siswa dan bagaimana pengelolaan dana BOS tersebut dikelola oleh pihak sekolah untuk kegiatan dan program apa saja, sehingga orang tua dapat secara transparansi mengetahui anggaran dana BOS tersebut.

Kondisi saat ini SD Muhammadiyah belum memiliki laporan yang terbuka dalam

pengelolaan dana BOS yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan, melalui prinsip Transparansi orang tua siswa (*stakeholder*) dapat mengetahui dan terlibat aktif dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan pengelolaan dana BOS, sehingga diharapkan bahwa SD Muhammadiyah mampu menerapkan prinsip transparansi dalam menciptakan tata kelola yang baik dari segi keuangan maupun administrasi, dan sekolah harus berupaya untuk terbuka pada proses perencanaan keuangan, proses realisasi hingga capaian dari sekolah. Dan perlu ditingkatkan lebih dalam laporan secara transparan dan akuntabilitas melalui konten berbasis web sekolah atau pengumuman sekolah, karena transparansi dan akuntabilitas yang baik akan meningkatkan pengelolaan keuangan yang baik pula sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kinerja di SD Muhammadiyah. Hal ini sejalan dengan penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana BOS (Prasetyowati, 2019) [23].

3. Adanya partisipasi masyarakat

Melalui adanya partisipasi tentunya akan mengembangkan adanya informasi yang transparan dalam SD Muhammadiyah sehingga meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh sekolah, dan akan memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan pengelolaan dana BOS dan kesempatan untuk melakukan kecurangan dalam aktivitas pengelolaan dana BOS di SD Muhammadiyah. Sehingga, seluruh kegiatan pengelolaan dana BOS dilaporkan secara lengkap kepada orang tua siswa (*stakeholder*) agar mereka

mendapatkan pengetahuan terkait pelaporan dana BOS di SD Muhammadiyah.

Partisipasi masyarakat (*stakeholder*) berhak untuk terlibat langsung atau tidak langsung melalui sosialisasi dengan melakukan komunikasi. Dengan adanya dukungan partisipatif dari *stakeholder* tentu akan menjadi control penting bagi sekolah agar mampu terus berupaya dikelola dan dioptimalkan kinerjanya secara Lembaga sehingga sekolah mampu mencapai visi misi yang telah ditentukan. Prinsip partisipatif yang diterapkan oleh SD Muhammadiyah dengan baik tentu akan menciptakan keunggulan bagi sekolah dalam pengelolaan keuangan yang semakin efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa untuk dapat meningkatkan pelayanan di Pendidikan dengan prinsip penyelenggaraan *good school governance* yang baik menunjukkan partisipasi atau *stakeholder* berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar (Hendri, 2019) [24].

4. Adanya keefektifan dan efisiensi

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian dapat diketahui bahwa SD Muhammadiyah dalam pengelolaan dana BOS dengan menerapkan prinsip efektivitas sebagai perwujudan *Good School Governance*. Penetapan sasaran dan tujuan merupakan indikator yang sangat penting keberadaannya untuk dapat mencapai penerapan efektivitas dan efisiensi yang sempurna, namun SD Muhammadiyah belum dapat memenuhi unsur tersebut secara sempurna dalam pengelolaan dana BOS karena dipengaruhi dengan adanya ketidaksesuaian mengenai waktu dalam pelaporan kepada

Dinas Pendidikan dan kepada orang tua siswa tersebut sehingga mengakibatkan tidak realisasinya unsur kepastian waktu.

Dalam perencanaan pengelolaan dana BOS SD Muhammadiyah sudah menggunakan dana sesuai skala prioritas serta kebutuhan program sekolah dan dibuat seminimal mungkin. Namun tidak dapat dipungkiri bahkan masih membutuhkan dana tambahan dari orang tua siswa untuk menutup dana operasional yang masih kurang tersebut. Belum berhasilnya prinsip efektivitas diterapkan secara sempurna dikarenakan masih ada indikator yang dalam pelaksanaannya selain indikator ketepatan waktu juga adanya perhitungan biaya namun tidak mampu memenuhi kebutuhan siswa secara sepenuhnya. Dari penjelasan bahwa pengelolaan dana BOS sebagai perwujudan *Good School Governance* telah menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas meskipun belum sepenuhnya unsur prinsip tersebut terpenuhi sebagai bentuk respon akan kebutuhan dan tuntutan yang dilontarkan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian bahwa kesederhanaan administrasi dan tata kelola yang baik harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan, dengan demikian proses pelayanan menjadi lebih baik [25].

5. Arturan Hukum

Adanya aturan hukum yang sudah terintegrasi dengan akuntabilitas yang berkaitan langsung dengan ketaatan sekolah atas pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan yang berlaku. SD Muhammadiyah dalam melaporkan pertanggungjawaban sering mengalami keterlambatan karena adanya

keterlambatan pencairan dana baik melalui online link BOS Sidoarjo Kab dan Bos Kemdikbut serta menyerahkan LPJ ke Dinas Pendidikan berupa Form BOS-K1, Form BOS-K2, Form BOS-K6, dan Form BOS-K7. Selain itu laporan pertanggung jawaban kepada orang tua selaku *stakeholder* seharusnya dilakukan dengan menempelkan laporan BOS K-1 sehingga pemangku kepentingan dapat membandingkan realisasi anggaran dengan rencana anggaran yang diterima. Hal ini tentu menentukan bahwa pengelolaan dana bos terdapat *check* dan *balance*, akuntabilitas akan sulit terlaksana tanpa pemantauan dan partisipasi dari masyarakat dalam menyangga penyelenggaraan pendidikan di SD Muhammadiyah. Seluruh kegiatan terkait pengelolaan dana BOS harus dilaporkan kepada *stakeholder* dan pemerintahan sehingga semua pihak mendapatkan pengetahuan terkait pengelolaan dana BOS di SD Muhammadiyah. Hal ini sejalan dengan penelitian bahwa sekolah harus bertindak secara akuntabilitas public terkait pemberian informasi kepada public dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (Desmiyawati dan Wulan, 2012) [26].

6. Keadilan

Penerapan prinsip keadilan dimana adanya kebijakan agar program dana BOS dapat memberikan keadilan bagi keluarga miskin atau kurang mampu untuk membiayai Pendidikan. Dimana penetapan kriteria yang jelas dan tegas terkait data siswa kurang mampu yang menjadi target penerimaan dana BOS di SD Muhammadiyah serta komitmen dan kepedulian dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat diperlukan dalam

melaksanakan Pendidikan dasar sehingga mereka tetap melanjutkan Pendidikan dalam pembiayaan di sekolah, dan adanya pemetaan data siswa atau *track record* yang terus dilakukan lebih akurat dan mensurvei tempat tinggal siswa untuk membuktikan apakah mereka benar-benar tidak mampu atau hanya sekedar informasi tertulis saja, sehingga penyaluran dan pelaksanaan dana BOS benar-benar sesuai dengan jumlah siswa yang ada SD Muhammadiyah dan adanya pengawasan baik internal atau persyarikatan Muhammadiyah dari sekolah dan eksternal atau pemerintah yang lebih intensif dari semua *stakeholder* dalam menyangga penyelenggaraan Pendidikan yang tetap harus didukung adanya integrasi transparansi dari sekolah dan tidak ada yang ditutupi dalam pelaporannya yang dilakukan oleh tim manajemen BOS SD Muhammadiyah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik.

7. Visi Strategik

Penerapan prinsi visi dan misi sekolah dapat menggambarkan lembaga pendidikan yang baik dalam merebut hati masyarakat, dimana visi dan misi strategik merupakan rencana skala besar yang berorientasi dalam jangka panjang. SD Muhammadiyah memiliki visi misi strategis untuk meningkatkan pengelolaan sehingga dapat mendukung pelaksanaan lembaga pendidikan dengan baik. Ketercapaian *good school governance* pada pengelolaan dana bos dengan keterlibatan *stakeholder* yang luas merupakan visi-misi dari kepala sekolah SD Muhammadiyah. Kategori Pendidikan sebagai satuan yang berorientasi pada *stakeholder* memang melakukan pelayanan berdasarkan indikator rata-rata

sekolah serta angka partisipasi murni dari orang tua siswa di SD Muhammadiyah dan harapan sekolah. Perencanaan sekolah yang dinilai berdasarkan perencanaan sesuai skala prioritas dan perencanaan progresif, SD Muhammadiyah akan melihat kesejahteraan masyarakat yang dinilai berdasarkan indikator dari siswa kurang mampu yang ada di sekolah. Kategori akuntabilitas di sekolah dapat dinilai dari indikator perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi serta capaian program dari pengelolaan dana BOS itu sendiri. Namun nyatanya dari visi strategik di SD Muhammadiyah hanya sebagian yang terpenuhi untuk mewujudkan *Good School Governance* yang ada, sehingga disinilah peran kepala sekolah untuk terus mewujudkan tata Kelola yang baik agar kinerja di sekolah terus meningkat dan optimal dalam pelaksanaannya.

Hal ini sejalan dengan penelitian bahwa kinerja pemerintah daerah harus di informasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai tingkat pencapaian hasil, dikaitkan dengan misi dan visi organisasi, serta dampak positif dan negative yang diakibatkan dari suatu kebijakan operasional yang telah diambil Soleh dan (Suripto, 2011;4) [27]. Melalui informasi informasi sehingga adanya perbaikan yang diperlukan atas suatu kebijakan dalam menetapkan program atau tujuan sehingga secara bersamaan dapat dijadikan umpan balik dalam perencanaan, penentuan tingkat keberhasilan serta dapat memutuskan suatu tindakan yang dinilai paling rasional dan menguntungkan.

Sesuai penjelasan di atas bahwa pengelolaan dana BOS dan *Good School Governance* (GSG) memiliki terkaitan

atau *relationship* menyatakan bahwa hubungan antara *Good School Governance* dan pengelolaan dana BOS senantiasa perlu ditingkatkan karena semakin tinggi penerapan *Good School Governance*, maka semakin tinggi tingkat pengelolaan dana BOS. Penelitian ini menunjukkan bahwa semua indikator akuntabilitas, transparansi partisipasi, efektif & efektifitas, aturan hukum, keadilan, dan visi strategik memiliki pengaruh yang cukup luas dalam mewujudkan *Good School Governance*. Pengaruh prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dominan dalam membentuk *good school governance* karena prinsip akuntabilitas tidak hanya terkait dengan masalah dana, namun juga terkait kegiatan pengelolaan yang efektif dan efisien serta tanggung jawab dari sekolah kepada orang tua siswa (*stakeholder*) SD Muhammadiyah, karena semakin akurat dan tepat waktu pelaporan penggunaan dana yang dikumpulkan, maka akan semakin tinggi partisipasi orang tua murid dalam penyelenggaraan pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan atas hasil analisis data yang sudah dilakukan, maka bisa ditarik kesimpulannya bahwa pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) masih belum terpenuhi dalam akuntabilitas, transparansi dan efektif & efisiensi, sehingga menyebabkan pelaksanaan *good school governance* belum maksimal dan harus selalu lebih ditingkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektif & efisiensi agar semakin meningkatnya efektivitas pengelolaan dana BOS. Sekolah diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan dan realisasi

dana, laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dan lebih mengikutsertakan wali murid atau komite sekolah dalam control pengawasan penggunaan dana bantuan. Bagi Dinas Pendidikan diperlukan upaya dalam meningkatkan kompetensi dan komitmen tim pengelolaan dana bantuan operasional sekolah agar penerapan *good school governance* berjalan baik dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk SD Muhammadiyah dan dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan pelaksanaan *good school governance* di sekolah dalam pengelolaan dana pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) khususnya dalam mengatur rencana penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS yang dikelola. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi sebagai bahan referensi maupun literatur mengenai dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai akuntabilitas, transparansi dan efektif & efisiensi pengeolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti menemukan keterbatasan pada penelitian ini antara lain, penelitian ini sekedar memakai obyek SD Muhammadiyah, sehingga penelitian tidak mewakili wilayah yang lebih luas dan metode pengambilan data pada penelitian ini wawancara, observasi dan dokumentasi. Diharapkan untuk peneliti berikutnya mampu memperluas obyek penelitian, sehingga hasil penelitian mampu mewakili wilayah yang lebih luas. Peneliti berikutnya sebaiknya mampu mengambil

metode atau jenis penelitian kuantitatif sehingga data dan informasi yang dihasilkan lebih akurat serta memberikan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Trihapsari, C., Mujahidah, F., & Humairoh, N. (2021). ENHANCEMENT OF THE QUALITY OF HUMAN RESOURCES THROUGH TRAINING AND DEVELOPMENT PROGRAMS IN SCHOOLS. *AL- TANZIM:Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 145–153. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v5i2.2325>.
- A A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2013, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Khasanah, N. (2018). Biaya Dan Manfaat Pendidikan. *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(5), 397–405
- Susilawati, N. L., Yudana, M., & Natajaya, N. (2014). ANALISIS BIAYA PENDIDIKAN PADA SMP CIPTA DHARMA. *E-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan*, 5(2).
- Prasojo, L. D. (2012). Financial Resources Sebagai Faktor Penentu Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Internasional Manajemen Pendidikan*, 4(02), 19–27.
- Idris, R. (2010). Apbn Pendidikan Dan Mahalnya Biaya Pendidikan. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 13(1), 92–110.

- 18

Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, e – ISSN : 2548-9224| p– ISSN : 2548-7507, Volume 7 Nomor 1, DOI : <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1247>, 799-809.

- D. B. H. Siringoringo2, "ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS) TERHADAP PARTISIPASIORANGTUA MURID," *Jurnal Ekonomi Bisnis No. 12* , vol. Vol. 14, pp. 79-87, Agustus 2009 .

Prasetyowati, E., 2019. Analisis Pengaruh Partisipasi, Transparansi, Demokratis Dan Saling Percaya Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)(Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Rumbia. *Jurnal Simplex*, 2(3).

- H. Susanti, "Penerapan Good School Governance (GSG) Dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Pengelolaan

Bantuan Operasional (BOS) Sekolah Dasar Kota Blitar," *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen* , Vols. Vol. 8,Nomor 1, pp. 74-84, Juni 2019.

Buss, D. M., & Shackelford, T. K. (2008). Attractive women want it all: Good genes, economic investment, parenting proclivities, and emotional commitment. *Evolutionary Psychology*, 6(1), 134-146. <https://doi.org/10.1177/147470490800600116>

Witaliza, D. &. (2012). PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, PENGENDALIAN INTERN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KINERJA ORGANISASI (Studi Empiris pada Rumah Sakit Swasta di Provinsi Riau). *Pekbis Jurnal*, Vol.4, No.1, Maret 2012: 26-33 , 26-33.

Chabib Soleh dan Suripto. 2011. Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. Fokus Media: Bandung.